

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini disebabkan karena jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi dimana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi. Pemerintah sudah berusaha semaksimal untuk meningkatkan kesejahteraan namun pertumbuhan penduduk melebihi daripada perkiraan pemerintah.
- b. Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena sektor lapangan kerja yang mendominasi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sektor pertanian yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, banyaknya lansia yang tidak produktif dan standar hidup layak yang rendah sehingga kemiskinan tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya IPM di DIY.
- c. Upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi upah minimum maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY akan menurun. Penetapan kebijakan upah minimum ini bertujuan untuk memberikan penghasilan yang layak bagi pekerja agar produktivitas pekerja meningkat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan serta melindungi pekerja agar tidak terjerat dalam lingkaran kemiskinan.
- d. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi penyerapan tenaga kerja maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY akan menurun. Lapangan kerja di DIY didominasi oleh pertanian karena kemudahan dalam menyerap tenaga kerja yang tidak memerlukan syarat-syarat tertentu.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

1. Model estimasi yang baik digunakan adalah model *fixed effect* dimana hasil koefisien determinasi *Adjusted R-Squared* (R^2) menunjukkan angka mendekati 1 yakni 0.989633 yang mana hasil dari regresi tersebut memiliki arti bahwa variabel persentase kemiskinan dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk, IPM, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran untuk peneliti berikutnya, untuk mengembangkan lagi tentang penelitian dengan variabel yang tidak berpengaruh atau hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori dan dalam penelitian ini variabel yang tidak berpengaruh yaitu variabel IPM.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan indikator-indikator makro ekonomi lain yang lebih berpengaruh terhadap permasalahan kemiskinan dan dapat menambahkan beberapa daerah lain sehingga menghasilkan penelitian yang bermanfaat, bervariasi dan lebih baik lagi.
3. Perbedaan hasil *variable* bebas yang digunakan harus dibuktikan lebih lanjut secara teori pada penelitian yang selanjutnya.

b. Aspek Praktis

1. Berdasarkan hasil penelitian, IPM tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yang menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat harus dikembangkan oleh pemerintah seperti pelayanan kesehatan gratis, membangun puskesmas lebih banyak di desa miskin dan tertinggal, memberikan pelayanan pendidikan secara gratis khususnya bagi masyarakat miskin. Membangun infrastruktur di wilayah yang memiliki akses yang terbatas seperti jalan yang rusak, fasilitas umum yang minim sehingga dengan terpenuhinya infrastruktur ini maka distribusi barang menjadi lebih mudah dan daya beli masyarakat meningkat.

2. Berdasarkan hasil penelitian penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja akan menurunkan kemiskinan di Kabupaten/Kota di DIY, dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak lagi maka kesejahteraan dapat cepat dirasakan oleh penduduk miskin, kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan pertumbuhan lapangan pekerjaan pada sektor-sektor ekonomi sehingga diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan pendapatan masyarakat dapat bertambah. Sektor yang paling dominan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Kabupaten/Kota DIY. Pemerintah dapat memberikan kebijakan untuk mendorong masyarakat agar dapat membuka lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan produk UMKM dan membantu menjual hasil produksi UMKM baik secara langsung maupun penjualan secara online, sehingga masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa mengandalkan pemerintah.